

ABSTRAK

Sabrina Noviarista, Implementasi PSAP 17 dalam Pengelolaan Properti Investasi: Studi Kasus di BPKAD Kabupaten Bangkalan. Dibawah bimbingan Rahmat Zuhdi, S.E., MSA., Ak., QIA., CA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17 tentang Akuntansi Properti Investasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplorasi dan studi kasus, penelitian ini menganalisis fenomena transformasi pencatatan properti investasi dari laporan keuangan tahun 2023 yang belum mengakui properti investasi, hingga tahun 2024 yang telah mencatat properti investasi senilai Rp 1,325 miliar. Studi ini mengidentifikasi beberapa kendala implementasi meliputi: keterbatasan sistem informasi, misplacement sumber daya manusia, kompleksitas identifikasi dan klasifikasi aset, fragmentasi sistem informasi, serta keterbatasan anggaran. Kendala teknis utama adalah ketiadaan kode rekening properti investasi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tahun 2023, yang mengakibatkan "kekosongan akuntansi" dan mendorong aset-aset yang substansinya merupakan properti investasi dikategorikan secara tidak tepat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pengelolaan properti investasi yang lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan pelaporan keuangan daerah, serta memberikan perspektif baru mengenai urgensi pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan adaptif dalam mendukung pengelolaan properti investasi pemerintah daerah.

Kata kunci: PSAP 17, Properti Investasi, Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi, Laporan Keuangan Daerah, Aset Daerah, Tata Kelola Keuangan Publik

ABSTRACT

Sabrina Noviarista, Implementation of PSAP 17 in Investment Property Management: Case Study at BPKAD Bangkalan Regency. Under the guidance of Rahmat Zuhdi, S.E., MSA, Ak, QIA, CA.

This study aims to explore the implementation of Government Accounting Standard Statement (PSAP) 17 on Investment Property Accounting at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Bangkalan Regency. Using a qualitative approach with exploratory and case study methods, this study analyzes the phenomenon of the transformation of recording investment property from the 2023 financial statements that have not recognized investment property, to 2024 which has recorded investment property worth Rp 1.325 billion. The study identified several implementation constraints including: information system limitations, misplacement of human resources, complexity of asset identification and classification, fragmentation of information systems, and budget constraints. The main technical constraint was the absence of an investment property account code in the Local Government Information System (SIPD) in 2023, which resulted in an “accounting void” and encouraged assets that were essentially investment property to be categorized inappropriately. This research contributes to the development of a more effective investment property management model that is aligned with local financial reporting needs, and provides a new perspective on the urgency of developing an integrated and adaptive information system to support local government investment property management.

Keywords: PSAP 17, Investment Property, Government Accounting, Information System, Local Financial Report, Local Assets, Public Financial Governance